Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 4983-4993
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4983-4993
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Inovasi Layanan melalui Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Sarana Prasarana di IAIN Parepare

Anwar Liling[1], Muhammad Ishak[2], Nining Artianasari Sulaiman[3]
[1,2,3] Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia
Email : anwarliling@iainpare.ac.id [1], muhammadishak@iainpare.ac.id [2], niningartianasari@iainpare.ac.id [3]

Abstrak

Pengabdian berbasis riset ini bertujuan mengembangkan model integrasi sistem informasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan sarana prasarana sebagai inovasi layanan kelembagaan di IAIN Parepare. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan institusi terhadap pengelolaan data aset yang terintegrasi, mencakup kondisi barang, lokasi, status penggunaan, kebutuhan pemeliharaan, serta dukungan pengambilan keputusan. Selama ini, pengelolaan data BMN dan sarana prasarana masih cenderung berjalan melalui alur administrasi berbeda dan tersebar pada unit kerja, sehingga monitoring, perencanaan, dan evaluasi belum optimal. Oleh karena itu, integrasi sistem informasi dikembangkan sebagai Teknologi Tepat Guna untuk mendukung tata kelola aset kampus yang efektif, akurat, transparan, dan berbasis data. Pelaksanaan pengabdian meliputi identifikasi kebutuhan pengguna, pemetaan proses bisnis, penyusunan indikator informasi, perancangan model integrasi sistem, uji coba, pelatihan pengguna, evaluasi efektivitas, serta penyusunan luaran. Hasil yang ditargetkan meliputi model integrasi sistem informasi BMN dan sarana prasarana, panduan penggunaan, peningkatan kapasitas pengguna, rekomendasi penguatan tata kelola aset, artikel pengabdian, serta dokumen pendukung Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Model ini diharapkan menjadi inovasi aplikatif dalam memperkuat kualitas layanan kelembagaan dan pengelolaan aset di IAIN Parepare.

Kata Kunci: Administrasi Kelembagaan, Barang Milik Negara, IAIN Parepare, Inovasi Teknologi Tepat Guna, Pengabdian kepada Masyarakat.

Abstract

This research-based community service project aims to develop an integrated information system model for the management of State-Owned Assets (BMN) and campus infrastructure, serving as an institutional service innovation at IAIN Parepare. The initiative is driven by the institution's need for an integrated asset data management system—encompassing asset condition, location, usage status, maintenance requirements, and decision-making support. Currently, the management of state-owned assets and infrastructure often operates through fragmented administrative workflows scattered across various units, which hinders optimal monitoring, planning, and evaluation. Consequently, an integrated information system has been developed as an "appropriate technology" (Teknologi Tepat Guna) to foster effective, accurate, transparent, and data-driven campus asset governance. The project encompasses several stages: identifying user needs, mapping business processes, establishing information indicators, designing the system integration model, conducting pilot testing, providing user training, evaluating effectiveness, and preparing project outputs. The targeted outcomes include an integrated information system model for state-owned assets and infrastructure, a user manual, enhanced user capacity, recommendations for strengthening

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

asset governance, a community service article, and documentation to support Intellectual Property Rights (IPR). This model is intended to serve as an applicable innovation that enhances the quality of institutional services and asset management at IAIN Parepare.
Keywords: *Institutional Administration, State Property, IAIN Parepare, Appropriate Technology Innovation, Community Service.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara dan sarana prasarana merupakan bagian penting dari tata kelola perguruan tinggi karena berkaitan langsung dengan dukungan terhadap proses akademik, administrasi, pelayanan publik, dan pengembangan kelembagaan. Aset kampus tidak hanya berupa tanah, bangunan, peralatan, dan fasilitas pendukung, tetapi juga menjadi sumber daya strategis yang menentukan efektivitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Oleh sebab itu, pengelolaan BMN dan sarana prasarana menuntut ketertiban administrasi, akurasi data, keterbukaan informasi internal, dan kemampuan institusi dalam memanfaatkan data aset sebagai dasar pengambilan keputusan (Republik Indonesia, 2014, 2020).

Dalam perspektif regulasi nasional, pengelolaan BMN telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan BMN harus dilakukan secara tertib, akuntabel, dan efisien mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga pengawasan. Pada level teknis, digitalisasi pengelolaan BMN juga diperkuat melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. PMK Nomor 118 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengelolaan BMN secara elektronik berbasis internet menggunakan aplikasi SIMAN, termasuk modul dashboard sebagai bagian dari sistemnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Artinya, tuntutan pengelolaan aset kampus tidak lagi cukup dilakukan secara manual atau parsial, tetapi harus bergerak ke arah integrasi informasi yang lebih kuat.

Dalam konteks IAIN Parepare, kebutuhan integrasi tersebut menjadi semakin penting. Kampus telah memiliki publikasi inventaris BMN tahun 2023, 2024, dan 2025 melalui PPID IAIN Parepare, serta jejak kelembagaan berupa pembentukan tim data BMN dan rapat monitoring evaluasi pengelolaan BMN. Fakta ini menunjukkan bahwa data dan aktivitas pengelolaan BMN sudah tersedia, tetapi tantangan utama terletak pada belum terhubungnya informasi BMN dengan data sarana prasarana operasional dalam satu sistem yang mudah dibaca dan digunakan oleh unit terkait (PPID IAIN Parepare, 2025; IAIN Parepare, 2023; SPI IAIN Parepare, 2023).

Pada saat yang sama, arah tata kelola kampus unggul menuntut penyelenggaraan layanan yang lebih cepat, transparan, berbasis data, dan mampu mendukung keputusan pimpinan secara tepat. Dalam konteks ini, pengelola BMN dan pengelola sarana prasarana tidak cukup hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tetapi harus didukung oleh sistem informasi yang memudahkan integrasi data, visualisasi kondisi aset, identifikasi kebutuhan pemeliharaan, dan perencanaan penggunaan sarana prasarana secara lebih efisien. Integrasi sistem informasi BMN dan sarana prasarana menjadi kebutuhan strategis agar data aset kampus tidak hanya tersimpan, tetapi juga dapat diolah menjadi informasi manajerial yang berguna (Laudon & Laudon, 2020).

Kebutuhan ini juga relevan dengan peran jabatan fungsional di bidang pengelolaan barang milik negara. Rezim jabatan ini berkembang dari Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang yang diatur dalam Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2018, petunjuk teknisnya dalam PMK Nomor 55/PMK.06/2019, lalu diperbarui dalam kerangka Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara melalui Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2023, yang dibaca bersama Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional secara umum (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2018, 2023a, 2023b; Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

2019). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN bukan semata pekerjaan administratif, tetapi bagian dari tata kelola profesional yang menuntut dukungan sistem informasi yang memadai.

Pengabdian ini menjadi relevan karena menawarkan solusi langsung terhadap kebutuhan kelembagaan IAIN Parepare. Program ini tidak berhenti pada inventarisasi atau pemutakhiran data, tetapi diarahkan pada pembangunan model integrasi sistem informasi yang dapat mendukung layanan pengelolaan aset kampus secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, proposal ini diharapkan berkontribusi terhadap penguatan tata kelola BMN, peningkatan layanan sarana prasarana, dan pengembangan budaya kerja kelembagaan yang lebih modern dan responsif.

FOKUS PENGABDIAN

Fokus pengabdian ini adalah integrasi sistem informasi pengelolaan Barang Milik Negara dan sarana prasarana sebagai instrumen inovasi layanan kelembagaan di IAIN Parepare. Fokus tersebut diarahkan pada penguatan tata kelola data aset kampus agar lebih terintegrasi, mudah ditelusuri, akurat, dan dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung pengambilan keputusan. Penekanan ini selaras dengan arah digitalisasi pengelolaan BMN melalui SIMAN dan penguatan proses bisnis aset negara yang terpusat dan berbasis data (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023; Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2024).

Secara operasional, fokus pengabdian mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi data, yaitu penyelarasan informasi BMN dan sarana prasarana yang selama ini dikelola secara terpisah. Kedua, dimensi teknologi, yaitu pembangunan model integrasi sistem informasi yang mampu menampilkan data secara informatif, mudah diakses, dan responsif. Ketiga, dimensi kelembagaan, yaitu pemanfaatan sistem terintegrasi untuk mendukung layanan administrasi, perencanaan, pemeliharaan, dan tata kelola kampus unggul di IAIN Parepare.

TUJUAN PENGABDIAN

Tujuan Umum

Membangun model integrasi sistem informasi pengelolaan Barang Milik Negara dan sarana prasarana sebagai inovasi layanan yang mendukung tata kelola kampus yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis data di IAIN Parepare.

Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap integrasi sistem informasi BMN dan sarana prasarana.
2. Memetakan proses bisnis pengelolaan BMN dan sarana prasarana di IAIN Parepare.
3. Menyusun indikator informasi yang dibutuhkan untuk mendukung layanan pengelolaan aset kampus.
4. Merancang model integrasi sistem informasi BMN dan sarana prasarana.
5. Menguji penggunaan model integrasi sistem pada unit sasaran.
6. Meningkatkan kapasitas pengguna dalam memanfaatkan sistem informasi terintegrasi.
7. Menghasilkan panduan penggunaan sistem integrasi informasi.
8. Menyusun rekomendasi penguatan tata kelola BMN dan sarana prasarana di IAIN Parepare.
9. Menghasilkan artikel pengabdian dan dokumen pendukung Hak Kekayaan Intelektual.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

ANALISIS STRATEGI PENGABDIAN

Strategi pengabdian ini dibangun atas asumsi bahwa persoalan utama pengelolaan BMN dan sarana prasarana di perguruan tinggi bukan terletak pada ketiadaan data, tetapi pada belum terintegrasinya data dan alur informasi dalam satu sistem yang mendukung layanan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, strategi pengabdian dirancang sebagai integrasi antara identifikasi kebutuhan, pemetaan proses bisnis, penyusunan indikator, pembangunan model sistem, pelatihan pengguna, dan pelembagaan hasil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip sistem informasi manajemen yang menekankan relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kemudahan penggunaan informasi untuk mendukung keputusan organisasi (Laudon & Laudon, 2020).

Strategi pertama adalah identifikasi kebutuhan pengguna. Tahap ini dilakukan untuk menggali kebutuhan unit pengelola BMN, pengelola sarana prasarana, pimpinan, dan unit pengguna terkait informasi apa saja yang benar-benar dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan aset kampus. Strategi kedua adalah pemetaan proses bisnis pengelolaan BMN dan sarana prasarana. Tahap ini penting agar integrasi sistem tidak hanya menyatukan data, tetapi juga menyelaraskan alur kerja dan fungsi kelembagaan yang selama ini berjalan secara terpisah.

Strategi ketiga adalah penyusunan indikator dan desain integrasi sistem informasi. Pada tahap ini tim menyusun struktur informasi yang akan ditampilkan dalam sistem, seperti jenis barang, lokasi, status pemanfaatan, kondisi, kebutuhan pemeliharaan, dan informasi lain yang mendukung layanan kelembagaan. Strategi keempat adalah uji coba dan pelatihan pengguna. Sistem yang dibangun diuji pada unit sasaran, kemudian diikuti dengan pelatihan agar pengguna memahami manfaat, fungsi, dan cara mengoperasikan sistem. Strategi kelima adalah evaluasi dan hilirisasi luaran. Tahap ini diarahkan pada perbaikan sistem, penyusunan panduan, rekomendasi penguatan tata kelola, artikel pengabdian, dan dokumen HKI.

Dengan strategi tersebut, pengabdian ini tidak hanya menghasilkan model sistem informasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih terintegrasi, responsif, dan berbasis data dalam pengelolaan BMN dan sarana prasarana di IAIN Parepare.

KAJIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kegiatan dilaksanakan pada September 2026 di Divisi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Data penelitian berupa dokumen Tunjangan Profesi Guru (TPG) PAI Non-PNS periode Juli dan Agustus 2026 serta 83 berkas administrasi tahun 2023–2025.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola aset dan sarana prasarana semakin penting dalam organisasi publik, terutama ketika institusi dituntut bekerja secara efisien, akuntabel, dan transparan. Sistem informasi yang terintegrasi terbukti membantu organisasi dalam mempercepat akses data, mengurangi duplikasi informasi, meningkatkan akurasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Literatur sistem informasi manajemen menegaskan bahwa nilai utama integrasi sistem terletak pada kemampuannya mengubah data yang tersebar menjadi informasi yang berguna bagi proses manajerial (Laudon & Laudon, 2020).

Dalam konteks pengelolaan BMN, perkembangan SIMAN Versi 2 juga menunjukkan arah kebijakan yang mendorong digitalisasi proses bisnis, perbaikan tata kelola, database aset yang lebih terpusat, dan dukungan pemantauan aset negara secara digital (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2024a, 2024b). Hal ini memberi dasar kuat bahwa integrasi informasi di level internal kampus akan relevan selama ditempatkan sebagai lapisan layanan kelembagaan yang mendukung pengelolaan BMN nasional, bukan menggantikannya.

Dalam konteks perguruan tinggi, aset kampus tidak hanya berfungsi sebagai barang inventaris, tetapi sebagai sumber daya strategis yang mendukung pembelajaran, layanan administrasi, dan pengembangan kelembagaan. Karena itu, pengelolaan BMN dan sarana

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

prasarana memerlukan pendekatan yang tidak semata administratif, tetapi juga informasional dan manajerial. Namun pada banyak institusi, data aset dan sarana prasarana masih dikelola secara terpisah sehingga belum memberi gambaran yang utuh bagi pimpinan dan pengelola.

Proposal ini memiliki kebaruan karena memadukan pengelolaan BMN, sarana prasarana, dan inovasi layanan dalam satu model pengabdian yang diarahkan pada kebutuhan nyata IAIN Parepare. Kebaruan lain terletak pada upaya menempatkan integrasi informasi sebagai instrumen layanan kelembagaan yang dapat memperkuat tata kelola kampus unggul melalui data aset yang lebih siap dipakai untuk monitoring, perencanaan, dan pengambilan keputusan.

KERANGKA KONSEP/TEORI RELEVAN

Kerangka konsep pengabdian ini bertumpu pada tiga landasan utama, yaitu teori sistem informasi manajemen, teori integrasi data, dan pendekatan tata kelola aset berbasis layanan. Teori sistem informasi manajemen menegaskan bahwa informasi yang baik harus relevan, akurat, tepat waktu, dan mudah digunakan untuk mendukung keputusan organisasi. Dalam konteks pengabdian ini, integrasi informasi BMN dan sarana prasarana diposisikan sebagai sarana untuk menghasilkan informasi yang lebih utuh dan bermanfaat bagi kampus (Laudon & Laudon, 2020).

Teori integrasi data menekankan bahwa sistem yang efektif tidak hanya menggabungkan data, tetapi juga menyelaraskan struktur informasi, alur kerja, dan kebutuhan pengguna. Oleh sebab itu, model integrasi yang dibangun dalam pengabdian ini diarahkan untuk mempertemukan dua domain utama, yaitu pengelolaan BMN dan pengelolaan sarana prasarana, ke dalam satu sistem informasi yang saling terhubung. Dalam praktik pengelolaan BMN, arah seperti ini juga sejalan dengan pengembangan SIMAN yang berbasis internet, modular, dan didorong untuk memperkuat proses bisnis digital aset negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023; Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2024a).

Sementara itu, pendekatan tata kelola aset berbasis layanan menempatkan aset kampus bukan sekadar objek inventaris, tetapi sebagai bagian dari kualitas layanan kelembagaan. Dengan sintesis tersebut, pengabdian ini memandang bahwa integrasi sistem informasi akan memberi nilai strategis apabila mampu menghubungkan data, kebutuhan layanan, dan keputusan kelembagaan dalam satu model yang operasional dan berkelanjutan.

METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pengembangan sistem informasi kelembagaan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter program yang tidak hanya membangun model integrasi sistem, tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut relevan, dipahami, dan digunakan oleh unit pengelola BMN dan sarana prasarana di IAIN Parepare. Lokasi pengabdian adalah IAIN Parepare dengan sasaran utama unit pengelola BMN, unit sarana prasarana, pimpinan, dan unit terkait lainnya yang menggunakan data aset dalam pengambilan keputusan. Data dan informasi diperoleh melalui observasi, wawancara terarah, telaah dokumen, diskusi kelompok, serta validasi pengguna terhadap rancangan sistem.

Metode pelaksanaan terdiri atas beberapa tahap. Pertama, identifikasi kebutuhan pengguna dan pemetaan proses bisnis pengelolaan BMN dan sarana prasarana. Kedua, penyusunan indikator informasi dan struktur data. Ketiga, perancangan model integrasi sistem informasi. Keempat, uji coba penggunaan model. Kelima, pelatihan dan pendampingan pengguna. Keenam, evaluasi efektivitas sistem. Ketujuh, penyusunan panduan, rekomendasi, artikel, dan dokumen HKI.

Indikator keberhasilan pengabdian meliputi tersusunnya model integrasi sistem informasi, meningkatnya keterhubungan data BMN dan sarana prasarana, meningkatnya

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

kemudahan akses informasi, meningkatnya kapasitas pengguna, tersedianya panduan penggunaan, dan tersusunnya rekomendasi penguatan tata kelola aset kampus. Dengan metodologi tersebut, pengabdian ini diarahkan untuk menghasilkan sistem yang tidak hanya selesai dirancang, tetapi siap dimanfaatkan secara berkelanjutan.

MATRIKS PERENCANAAN OPERASIONAL

Pelaksanaan pengabdian ini dirancang secara bertahap agar integrasi sistem informasi BMN dan sarana prasarana berjalan sistematis dan menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola kelembagaan di IAIN Parepare.

Persiapan | Minggu 1
Aktivitas: koordinasi tim, penetapan sasaran, penyusunan instrumen, dan jadwal kerja.
Output: dokumen persiapan dan rencana kerja.
Indikator keberhasilan: tim dan unit sasaran menyepakati peran dan jadwal kegiatan.

Identifikasi Kebutuhan dan Pemetaan Proses Bisnis | Minggu 2
Aktivitas: observasi, wawancara, telaah dokumen, dan pemetaan alur pengelolaan BMN serta sarana prasarana.
Output: peta kebutuhan pengguna dan proses bisnis.
Indikator keberhasilan: kebutuhan pengguna dan alur pengelolaan teridentifikasi secara sistematis.

Penyusunan Indikator dan Struktur Data | Minggu 3
Aktivitas: penyusunan kategori informasi, indikator, dan struktur data sistem. Output: indikator dan struktur data integrasi sistem.
Indikator keberhasilan: tersedia format informasi yang seragam dan relevan.

Perancangan Model Integrasi Sistem | Minggu 4 sampai 5
Aktivitas: penyusunan desain model integrasi, tampilan sistem, dan alur akses informasi.
Output: prototype model integrasi sistem informasi.
Indikator keberhasilan: model tersedia dan siap diuji.

Uji Coba dan Pelatihan | Minggu 6
Aktivitas: uji penggunaan sistem, pelatihan pengguna, dan simulasi pemanfaatan informasi.
Output: pengguna memahami fungsi dan penggunaan sistem.
Indikator keberhasilan: pengguna mampu mengoperasikan sistem secara mandiri.

Evaluasi Pemanfaatan | Minggu 7
Aktivitas: pengumpulan umpan balik, refleksi, dan penyempurnaan model integrasi. Output: laporan evaluasi penggunaan dan model yang disempurnakan.
Indikator keberhasilan: terdapat peningkatan kemudahan penggunaan dan manfaat informasi.

Penyusunan Luaran | Minggu 8
Aktivitas: penyusunan panduan penggunaan, artikel pengabdian, rekomendasi tata kelola, dan dokumen HKI.
Output: panduan, artikel, rekomendasi, dan dokumen HKI. Indikator keberhasilan: luaran akademik dan praktis tersusun.

STAKEHOLDER TERKAIT

Keberhasilan pengabdian ini sangat ditentukan oleh keterlibatan stakeholder yang relevan karena integrasi sistem informasi BMN dan sarana prasarana tidak dapat dibangun hanya dari sisi teknis. Dibutuhkan kolaborasi antara pengelola BMN, pengelola sarana prasarana, pimpinan, unit pengguna, dan tim pengabdi agar model yang dihasilkan benar-benar operasional dan berguna.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Pengelola BMN menjadi aktor utama karena berperan dalam penyediaan dan validasi data aset negara. Pengelola sarana prasarana berperan dalam penyediaan data operasional, kondisi fasilitas, dan kebutuhan layanan kampus. Pimpinan memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan integrasi data dan pemanfaatan sistem untuk pengambilan keputusan. Unit pengguna kampus menjadi pihak yang memperoleh manfaat langsung dari ketersediaan informasi aset dan sarana prasarana yang lebih tertata. Sementara itu, tim pengabdi berperan sebagai fasilitator, perancang model integrasi, penyusun panduan, evaluator, dan pengelola luaran pengabdian.

Dengan keterlibatan seluruh stakeholder tersebut, pengabdian ini diharapkan menghasilkan sistem layanan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan dalam pengelolaan BMN dan sarana prasarana di IAIN Parepare.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian

1. Identifikasi Kebutuhan Integrasi Sistem Informasi BMN dan Sarana Prasarana

Hasil identifikasi kebutuhan menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan sarana prasarana merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan layanan kelembagaan di IAIN Parepare. Pengelolaan BMN berorientasi pada pencatatan, penatausahaan, dan pengawasan aset negara, sedangkan pengelolaan sarana prasarana lebih menekankan pada kondisi, ketersediaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan fasilitas kampus. Perbedaan orientasi tersebut membutuhkan mekanisme pertukaran informasi yang lebih terstruktur agar data aset dapat dimanfaatkan secara optimal oleh unit pengelola maupun pimpinan institusi.

Kebutuhan utama yang dirumuskan dalam kegiatan ini mencakup ketersediaan informasi mengenai identitas barang, kode inventaris, jenis aset, lokasi, kondisi barang, status penggunaan, unit penanggung jawab, dan kebutuhan pemeliharaan. Informasi tersebut menjadi komponen penting dalam membangun basis data yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aset kampus. Dengan demikian, integrasi sistem tidak hanya diarahkan untuk menyatukan data administratif, tetapi juga menghubungkan informasi aset dengan kebutuhan operasional pelayanan pendidikan dan administrasi kelembagaan.

2. Pemetaan Proses Bisnis Pengelolaan BMN dan Sarana Prasarana

Pemetaan proses bisnis menjadi tahapan penting dalam merancang integrasi sistem informasi. Pengelolaan BMN memiliki alur yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, dan pengawasan. Sementara itu, pengelolaan sarana prasarana berkaitan dengan pendataan fasilitas, pemantauan kondisi, pelaporan kerusakan, pengajuan kebutuhan perbaikan, serta evaluasi pemanfaatan fasilitas. Kedua alur tersebut perlu dihubungkan melalui mekanisme pengelolaan informasi yang memiliki standar pencatatan dan pembaruan data.

Berdasarkan pemetaan tersebut, model integrasi dirancang dengan menempatkan unit pengelola BMN sebagai sumber data administratif aset dan unit sarana prasarana sebagai penyedia informasi kondisi serta kebutuhan operasional fasilitas. Selanjutnya, pimpinan dan unit pengguna memperoleh akses informasi sesuai kewenangan masing-masing. Pembagian peran tersebut diharapkan dapat mengurangi duplikasi pencatatan, mempermudah penelusuran informasi, dan meningkatkan koordinasi ant unit dalam pengelolaan aset kampus.

3. Perancangan Model Integrasi Sistem Informasi

Hasil pengembangan utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah rancangan model integrasi sistem informasi BMN dan sarana prasarana yang terdiri atas tiga komponen, yaitu basis data aset, pengelolaan informasi operasional, dan layanan informasi manajerial. Basis data aset memuat identitas dan karakteristik barang, sedangkan pengelolaan informasi

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

operasional mencakup lokasi, kondisi, status penggunaan, serta kebutuhan pemeliharaan. Adapun layanan informasi manajerial diarahkan untuk menyajikan data dalam bentuk informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan serta pengambilan keputusan.

Model integrasi tersebut dirancang agar informasi yang sebelumnya tersebar pada unit-unit kerja dapat dihimpun dalam satu kerangka pengelolaan data yang saling terhubung. Sistem juga diarahkan untuk menyediakan fitur pencarian aset, pengelompokan berdasarkan kategori dan lokasi, pemantauan kondisi barang, serta penyajian informasi kebutuhan pemeliharaan. Dengan struktur tersebut, pengelolaan aset tidak lagi hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi berkembang menjadi sistem informasi yang mendukung kebutuhan manajemen kelembagaan.

4. Uji Coba, Pelatihan, dan Penguatan Kapasitas Pengguna

Uji coba dan pelatihan merupakan bagian dari strategi implementasi model integrasi sistem informasi. Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, mudah dipahami, dan dapat mendukung pekerjaan administratif maupun operasional. Pengguna sasaran meliputi pengelola BMN, pengelola sarana prasarana, pimpinan, serta unit-unit yang membutuhkan informasi mengenai aset kampus.

Materi pelatihan diarahkan pada pengenalan struktur informasi, prosedur akses sistem, pencarian data aset, pembaruan informasi, serta pemanfaatan data untuk kebutuhan monitoring dan perencanaan. Selain aspek teknis, penguatan kapasitas pengguna juga mencakup pemahaman mengenai pentingnya konsistensi data, ketepatan pembaruan informasi, pembagian kewenangan akses, dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan data kelembagaan. Melalui pendekatan partisipatif, pengguna diharapkan tidak hanya menjadi penerima teknologi, tetapi juga terlibat dalam proses pengembangan dan keberlanjutan sistem.

5. Evaluasi dan Target Luaran Pengabdian

Evaluasi model integrasi diarahkan pada beberapa indikator, yaitu keterhubungan data BMN dan sarana prasarana, kemudahan akses informasi, kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, kejelasan prosedur pengelolaan data, serta potensi pemanfaatannya dalam mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi aspek yang perlu disempurnakan, baik dari sisi struktur data, tampilan sistem, prosedur penggunaan, maupun pembagian kewenangan ant unit kerja.

Luaran yang dirancang meliputi model integrasi sistem informasi BMN dan sarana prasarana, panduan penggunaan sistem, peningkatan kapasitas pengguna, rekomendasi penguatan tata kelola aset kampus, artikel pengabdian kepada masyarakat, serta dokumen pendukung Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keseluruhan luaran tersebut diarahkan agar hasil pengabdian tidak berhenti pada rancangan teknologi, tetapi dapat menjadi dasar pengembangan layanan pengelolaan aset yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di IAIN Parepare.

Pembahasan

1. Integrasi Sistem Informasi sebagai Inovasi Layanan Kelembagaan

Integrasi sistem informasi BMN dan sarana prasarana menunjukkan pentingnya perubahan orientasi pengelolaan aset dari pendekatan administratif yang terpisah menuju tata kelola informasi yang terintegrasi. Dalam konteks perguruan tinggi, aset tidak hanya dipandang sebagai barang inventaris yang harus dicatat dan dilaporkan, tetapi juga sebagai sumber daya strategis yang menunjang proses pembelajaran, pelayanan administrasi, dan pengembangan institusi. Oleh karena itu, ketersediaan informasi aset yang akurat dan mudah diakses menjadi salah satu prasyarat dalam meningkatkan kualitas layanan kelembagaan.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Perspektif tersebut sejalan dengan Laudon dan Laudon (2020), yang menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen memiliki fungsi strategis dalam mengolah data menjadi informasi yang mendukung koordinasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan organisasi. Integrasi data BMN dan sarana prasarana di IAIN Parepare menjadi bentuk penerapan prinsip tersebut karena berupaya menghubungkan informasi administratif dengan kebutuhan operasional kampus. Dengan demikian, nilai inovasi tidak semata-mata terletak pada penggunaan teknologi digital, tetapi pada kemampuannya memperbaiki proses kerja dan kualitas layanan kelembagaan.

2. Relevansi Integrasi Sistem dengan Kebijakan Pengelolaan BMN Nasional

Pengembangan model integrasi sistem informasi di IAIN Parepare memiliki relevansi dengan arah kebijakan nasional mengenai digitalisasi pengelolaan BMN. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menegaskan pentingnya pengelolaan BMN secara tertib, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 memberikan landasan pengelolaan BMN secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

Dalam hubungan tersebut, model integrasi yang dikembangkan pada tingkat institusi perlu diposisikan sebagai sistem pendukung layanan internal yang melengkapi mekanisme pengelolaan BMN nasional. Artinya, sistem yang dikembangkan tidak dimaksudkan untuk menggantikan SIMAN, melainkan membantu menghubungkan kebutuhan informasi operasional sarana prasarana dengan data administratif aset yang dikelola institusi. Posisi ini penting agar inovasi teknologi yang dihasilkan tetap sejalan dengan regulasi, kewenangan pengelolaan, dan standar administrasi aset negara.

3. Penguatan Tata Kelola Data dan Akuntabilitas Kelembagaan

Salah satu tantangan dalam pengelolaan aset institusi adalah memastikan konsistensi data antara unit yang bertanggung jawab terhadap administrasi BMN dan unit yang mengelola pemanfaatan sarana prasarana. Ketika informasi mengenai identitas barang, lokasi, kondisi, dan status penggunaan tidak diperbarui secara terkoordinasi, institusi berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh gambaran aktual mengenai kebutuhan aset. Oleh karena itu, integrasi sistem perlu disertai standardisasi struktur data, mekanisme validasi, dan penetapan tanggung jawab setiap unit pengelola.

Dalam perspektif tata kelola kelembagaan, standardisasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas karena setiap informasi memiliki sumber, penanggung jawab, dan mekanisme pembaruan yang jelas. Integrasi juga memungkinkan proses penelusuran informasi dilakukan secara lebih sistematis sehingga mendukung monitoring dan evaluasi aset. Dengan demikian, penguatan sistem informasi perlu dipahami sebagai bagian dari pembenahan tata kelola organisasi, bukan sekadar pengembangan perangkat teknologi.

4. Integrasi Informasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan

Ketersediaan informasi mengenai kondisi dan pemanfaatan aset memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan pimpinan. Informasi mengenai barang yang mengalami kerusakan, fasilitas yang membutuhkan pemeliharaan, serta aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas kebutuhan dan alokasi sumber daya. Tanpa dukungan informasi yang terintegrasi, keputusan pengelolaan aset cenderung membutuhkan proses pengumpulan data dari berbagai unit sehingga berpotensi memperlambat respons kelembagaan.

Melalui model integrasi yang dirancang, informasi aset diharapkan dapat disajikan secara lebih sistematis dan mendukung proses perencanaan berbasis kebutuhan aktual. Pimpinan dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk menentukan prioritas pemeliharaan, mengevaluasi penggunaan fasilitas, dan merencanakan pengembangan sarana prasarana.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Hal ini memperlihatkan bahwa sistem informasi memiliki fungsi manajerial yang penting, yaitu menjembatani kebutuhan operasional dengan kebijakan strategis institusi.

5. Keberlanjutan Inovasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan integrasi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas rancangan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan. Sistem yang baik tidak akan memberikan manfaat optimal apabila pengguna belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur pengoperasian, pembaruan data, dan pemanfaatan informasi. Karena itu, pelatihan, pendampingan, penyusunan panduan, serta evaluasi berkala menjadi komponen penting dalam menjaga keberlanjutan inovasi.

Selain itu, diperlukan kebijakan internal yang mengatur standar pengelolaan data, pembagian hak akses, mekanisme validasi, keamanan informasi, dan koordinasi ant unit. Dukungan pimpinan juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem digunakan sebagai bagian dari proses kerja kelembagaan, bukan hanya sebagai perangkat tambahan. Dengan dukungan tersebut, model integrasi sistem informasi BMN dan sarana prasarana berpotensi berkembang menjadi instrumen transformasi layanan yang mendukung tata kelola kampus yang adaptif, transparan, dan berbasis data.

SIMPULAN

Pengabdian berbasis riset mengenai integrasi sistem informasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan sarana prasarana di IAIN Parepare menegaskan pentingnya pengembangan tata kelola aset yang terintegrasi, sistematis, dan berbasis kebutuhan kelembagaan. Model yang dikembangkan mencakup penyelarasan data administratif BMN dengan informasi operasional sarana prasarana, meliputi identitas barang, lokasi, kondisi, status penggunaan, dan kebutuhan pemeliharaan. Integrasi tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas administrasi, mempermudah monitoring aset, serta menyediakan informasi yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan pimpinan. Dalam konteks kebijakan nasional, model ini berfungsi sebagai inovasi layanan internal yang mendukung pengelolaan BMN berbasis digital dan melengkapi sistem SIMAN.

Keberlanjutan model integrasi memerlukan dukungan kebijakan institusi, standardisasi data, pembagian kewenangan yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi dan pemutakhiran sistem secara berkala. Keterlibatan pengelola BMN, pengelola sarana prasarana, pimpinan, dan unit pengguna menjadi faktor penting dalam memastikan sistem dapat dimanfaatkan secara konsisten. Dengan demikian, integrasi sistem informasi tidak hanya berorientasi pada digitalisasi administrasi aset, tetapi juga menjadi instrumen penguatan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas layanan kelembagaan di IAIN Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2024a). *Implementasi aplikasi SIMAN Versi 2 dalam pengelolaan BMN*.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2024b). *Pengelolaan aset negara yang terintegrasi melalui SIMAN V2*.

IAIN Parepare. (2023). *Data Barang Milik Negara, Rektor Bentuk Tim*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.06/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara*.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang.*

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023a). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023b). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara*.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson.

PPID IAIN Parepare. (2025). *Laporan inventaris Barang Milik Negara*.

Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

SPI IAIN Parepare. (2023). *Rapat monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN di lingkup IAIN Parepare*.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923